

Efektivitas Dan Optimalisasi Dua Periode Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Ke Tujuh: Joko Widodo

Dewi Krisna Hardjanti ✉

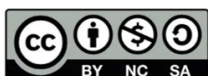
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

✉ dewi.hardjanti@uajy.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/h4csb423>

Abstrak

Kajian ini membahas tentang Efektivitas dan Optimalisasi Dua Periode Pemerintahan Presiden Republik Indonesia ke Tujuh: Joko Widodo. Sebagai negara yang memegang teguh prinsip demokrasi dan menganut sistem pemerintahan presidensial, Indonesia memberikan pembatasan kekuasaan kepada Presiden yaitu selama dua periode masa jabatan. Sejarah mencatat, setelah reformasi hingga saat ini, terdapat dua Presiden yang dipercaya oleh rakyat untuk memegang jabatan sampai dengan dua periode, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI ke enam dan Joko Widodo (atau sering disebut dengan Jokowi) sebagai Presiden RI ke tujuh. Masa kepresidenan Jokowi dimulai pada bulan Oktober 2014, telah ditandai dengan berbagai upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Berbagai upaya tersebut antara lain dalam bidang pembangunan ekonomi dan infrastruktur, reformasi birokrasi, program-program kesejahteraan



© 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

sosial, desentralisasi dan otonomi daerah, kebijakan lingkungan hidup, perlindungan HAM, dan lain sebagainya. Selama dua periode kepemimpinannya, ditemukan berbagai kepuasan maupun kekecewaan dari masyarakat yang telah meletakkan harapan yang sangat besar terhadapnya. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepresidenan Jokowi telah menunjukkan efektivitas di beberapa bidang pemerintahan, terutama dalam bidang infrastruktur dan kesejahteraan sosial, namun masih ada tantangan dalam tata kelola lingkungan dan kurang optimalnya perlindungan HAM. Ke depan, reformasi yang berkelanjutan dan pelibatan publik akan sangat penting untuk tata kelola pemerintahan yang optimal.

Kata Kunci

Dua Periode, Efektivitas, Jokowi, Optimalisasi, Presiden

I. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam sebuah negara republik, pergantian kekuasaan secara legal dilakukan dengan cara pemilihan umum secara berkala. Berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUDNRI Tahun 1945, Indonesia melakukan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD. Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial dimana Presiden adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia, baik

buruknya citra negara berada di segala sikap dan perilaku Presiden. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Peran Presiden begitu besar sehingga pada saat Pemilu berlangsung, tidak jarang ditemui masyarakat Indonesia memberikan perhatian yang lebih kepada siapa yang akan dipilihnya sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden daripada memberikan perhatiannya untuk calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Masyarakat Indonesia menaruh harapan yang sangat besar terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih. Hal ini menjadikan tantangan besar bagi setiap calon Presiden dan Wakil Presiden. Tidak hanya berfokus pada perencanaan program-program dalam pemerintahannya, namun calon Presiden dan Wakil Presiden harus memikirkan betul apakah setiap program yang direncanakan dapat diterapkan dalam masa kepemimpinannya. Berdasarkan Pasal 7 UUDNRI Tahun 1945, Presiden dan Wakil Presiden dapat memegang jabatan sampai dengan dua periode. Sejarah mencatat, setelah reformasi hingga saat ini, terdapat dua Presiden yang dipercaya oleh rakyat untuk memegang jabatan sampai dengan dua periode, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI enam dan Joko Widodo (atau sering disebut dengan Jokowi) sebagai Presiden RI ke tujuh.

Penulis memilih untuk mengkaji masa kepresidenan Jokowi karena banyak hal yang menurut penulis menarik untuk dibahas mengingat dalam karirnya, beliau memiliki pengalaman sebagai eksekutif dari sebagai Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga menjadi Presiden selama dua periode. Dari pengalaman tersebut, tentu sangat menarik untuk mengkaji berbagai program kerja yang telah dilakukan beliau ketika menjabat sebagai Presiden selama dua periode. Masa kepresidenan Jokowi yang dimulai pada bulan Oktober 2014 telah ditandai dengan berbagai upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan Indonesia. Berbagai

upaya tersebut antara lain dalam bidang pembangunan ekonomi dan infrastruktur, reformasi birokrasi, program-program kesejahteraan sosial, desentralisasi dan otonomi daerah, kebijakan lingkungan hidup, perlindungan HAM, dan lain sebagainya. Pada periode pertama masa kepresidenannya, masyarakat Indonesia sangat puas dengan pemerintahan Jokowi sehingga beliau terpilih lagi dalam periode yang kedua. Efektivitas pemerintahan Jokowi dipertaruhkan dalam periode kedua. Apakah segala programnya masih dilakukan dengan baik atau justru mengalami kemunduran. Dalam periode kedua hingga akhir masa jabatannya, banyak hal positif yang dilakukan bahkan ditemui kelompok-kelompok masyarakat yang menginginkan beliau untuk meneruskan masa jabatannya menjadi tiga periode yang tentu tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan Konstitusi. Namun tidak dapat dipungkiri ditemukan berbagai kalangan masyarakat yang kurang puas atas pemerintahan Jokowi karena ditemukan berbagai kekurangan beliau sebagai imbas dari masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan atau sudah diselesaikan namun belum optimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat kajian dengan judul Efektivitas dan Optimalisasi Dua Periode Pemerintahan Presiden Republik Indonesia ke Tujuh: Joko Widodo.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka perumusan masalah dalam kajian ini adalah bagaimana efektivitas dan optimalisasi dua periode pemerintahan Presiden Republik Indonesia ke tujuh: Joko Widodo?

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan lain-lain yang berfokus pada efektivitas dan optimalisasi dua periode pemerintahan Presiden Republik Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni menggunakan data sekunder melalui studi dokumen maupun kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data secara deskriptif.

III. Pembahasan

Dua periode pemerintahan, atau sepuluh tahun lamanya, adalah waktu yang diberikan oleh Konstitusi bagi Presiden Indonesia untuk melakukan segala upaya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Periode tersebut bisa saja sangat cepat, atau bahkan sangat lama bagi Presiden untuk mewujudkan program kerjanya. Namun, dua periode menjadi waktu yang cukup bagi rakyat untuk dapat memberikan penilaian apakah segala upaya yang telah dilakukan oleh Presiden telah efektif atau tidak, telah optimal atau belum. Semenjak terpilihnya, yaitu pada tahun 2014, berbagai upaya telah dilakukan oleh Presiden Jokowi, baik dalam memenuhi janji kampanyenya, maupun untuk menjawab kebutuhan rakyat. Adapun upaya-upaya tersebut antara lain:

A. Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur

Pembangunan ekonomi adalah setiap kegiatan yang dilakukan suatu negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Atau

dengan kata lain, pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai perbaikan sistem kelembagaan.¹ Berdasarkan teori tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi membawa perkembangan bagi masyarakat, yaitu menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan. Pelaksanaan konkritnya, perkembangan ekonomi dalam sebuah negara selalu diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang selalu diupayakan oleh negara dalam menggerakkan roda pembangunan.

Pembangunan infrastruktur merupakan modal atau kapital dalam upaya peningkatan produktivitas perekonomian negara serta usaha peningkatan taraf hidup masyarakat secara luas. Indonesia selalu berusaha untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di setiap aspek kehidupan. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia digagas guna memastikan terjaminnya ketersediaan infrastruktur agar dapat menjadi lompatan bagi Indonesia untuk menuju negara maju, sekaligus dapat lepas dari perangkap sebagai negara berkembang saja atau "*middle income trap*".² Dalam hubungan infrastruktur dengan

¹ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi*, Ekonomi Pembangunan Edisi 5 (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009), h.15.

² Eddy Cahyono Sugiarto, *Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Indonesia Maju*, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2024, [https://www.setneg.go.id/baca/index/melanjutkan_pembangunan_infrastruktur_dan_indonesia_maju#:~:text=Pembangunan%20infrastruktur%20merupakan%20modal%20atau,taraf%](https://www.setneg.go.id/baca/index/melanjutkan_pembangunan_infrastruktur_dan_indonesia_maju#:~:text=Pembangunan%20infrastruktur%20merupakan%20modal%20atau,taraf%20)

pembangunan ekonomi, tingkat ketersediaan infrastruktur di suatu negara adalah faktor penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Pembangunan infrastruktur merupakan modal atau kapital dalam upaya peningkatan produktivitas perekonomian negara serta usaha peningkatan taraf hidup masyarakat secara luas.³

Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam sektor pembangunan infrastruktur pada era kepemimpinan Presiden Jokowi. Salah satu fokus utama pemerintahan Jokowi adalah meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas di seluruh Indonesia sehingga tidak lagi ditemui hambatan dalam bentuk kerusakan jalan atau lamanya waktu tempuh perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain. Hal tersebut dapat dilihat dari pesatnya pembangunan jalan tol di Indonesia. Salah satu yang menjadi perhatian publik yakni pembangunan Jalan Tol Trans. Proyek infrastruktur ini menjadi salah satu dari proyek-proyek strategis selain jalur kereta api yang telah membuka akses ke daerah-daerah terpencil. Kehadiran infrastruktur ini tidak hanya memperlancar mobilitas penduduk, tetapi juga mengurangi biaya logistik, membuka peluang investasi baru, dan memperkuat konektivitas antar wilayah. Data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan bahwa penyelesaian proyek-proyek infrastruktur ini telah memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi regional. Akses yang lebih baik ke pusat-pusat ekonomi

20hidup%20masyarakat%20secara%20luas , diakses 4 Nov 2024 pukul 17.58 wib.

³ *Ibid.*

meningkatkan daya saing daerah, mengundang investasi sektor swasta, dan menciptakan lapangan kerja baru.⁴

Pembangunan infrastruktur di Indonesia telah menjadi prioritas utama selama era pemerintahan Presiden Jokowi. Selama satu dekade terakhir, berbagai proyek besar diluncurkan untuk memperkuat konektivitas dan mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tak hanya difokuskan di Pulau Jawa, pembangunan ini juga menyasar wilayah-wilayah yang sebelumnya kurang tersentuh, dalam konsep pembangunan *Indonesiasentris*, visi untuk memastikan seluruh wilayah Indonesia dapat terhubung secara fisik dan ekonomi. Sejak awal kepemimpinannya, Jokowi menekankan pentingnya infrastruktur sebagai "lokomotif" yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Infrastruktur yang baik bukan hanya menciptakan konektivitas antar wilayah, tetapi juga mempercepat pergerakan barang dan jasa, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.⁵ Dalam sepuluh tahun terakhir, pemerintah telah membangun berbagai infrastruktur, termasuk 2.103 km jalan tol, 40 bendungan, 27 bandara baru, serta proyek besar lainnya seperti jalur kereta api dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah tidak hanya fokus pada

⁴ Informasi statistik Infrastruktur Kementerian PUPR 2023, <https://data.pu.go.id/sites/default/files/BIS%20PUPR%20Tahun%202023.pdf>

⁵ Eri Sutrisno, *10 Tahun Pembangunan Infrastruktur: Menghubungkan Nusantara, Menggerakkan Ekonomi*, Indonesia.go.id, 2024, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8648/10-tahun-pembangunan-infrastruktur-menghubungkan-nusantara-menggerakkan-ekonomi?lang=1> , diakses 4 Nov 2024 pukul 18.34 wib.

daerah-daerah pusat ekonomi seperti Pulau Jawa dan Sumatra, tetapi juga memperluas proyek pembangunan ke wilayah-wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Pembangunan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua wilayah Indonesia dapat terhubung dan berkontribusi dalam perekonomian nasional. Di daerah-daerah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan, pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara telah mengubah wajah ekonomi lokal. Sebelumnya, keterbatasan infrastruktur membuat daerah-daerah ini terisolasi dan sulit untuk mengakses pasar nasional maupun global. Namun, dengan adanya jalan Trans-Papua dan berbagai proyek pembangunan lainnya, konektivitas semakin membaik, memudahkan distribusi barang dan membuka peluang ekonomi baru.⁶ Selain memberikan dampak ekonomi, pembangunan infrastruktur di bawah kepemimpinan Jokowi juga memberikan dampak positif pada aspek sosial dan pembangunan manusia. Pembangunan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan telah menciptakan fondasi yang lebih kokoh untuk pembangunan manusia.⁷

Berdasarkan rangkuman data yang didapatkan dari Informasi Statistik Infrastruktur Kementerian PUPR 2023,

⁶ *Ibid.*

⁷ Hafi Amarta Afroni Rohim, *Pembangunan Infrastruktur Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2024, https://www.setneg.go.id/baca/index/pembangunan_infrastruktur_dorong_pertumbuhan_ekonomi_indonesia, diakses 4 Nov 2024 pukul 18.06 wib.

perkembangan pembangunan infrastruktur pada Pemerintahan Presiden Jokowi antara lain:⁸

1. Pembangunan 19.377 Jembatan Nasional dengan total panjang mencapai 562.213,79 m.
2. Pembangunan 596 jembatan gantung dengan total panjang 44.615,6 m.
3. Pembangunan 393 BUMD Air Minum.
4. Rehabilitasi dan renovasi fasilitas pendidikan sejumlah 3.239 sekolah, 513 madrasah, 58 PTN, dan 11 PTKIN.
5. Pembangunan, renovasi atau rehabilitasi 49 sarana olahraga.
6. Penyaluran prasarana, sarana, dan utilitas umum sebanyak 43.008.
7. Sektor konstruksi menempati posisi ke-4 dalam kontribusinya pada pembentukan Produk Domestik Bruto.
8. dan lain sebagainya

Melengkapi data statistik tersebut, World Bank memberikan laporan senada mengenai pembangunan infrastruktur pada Pemerintahan Presiden Jokowi sebagai berikut:⁹

1. Pertumbuhan Domestik Bruto sebesar 5,1 persen pada Triwulan 1 tahun 2024 tetap tangguh dan melampaui pertumbuhan rata-rata negara berpenghasilan menengah.
2. Inflasi kembali meningkat di tahun 2024, setelah sempat turun di sepanjang tahun 2023, akibat tekanan harga pangan.

⁸ Informasi statistik Infrastruktur Kementerian PUPR 2023, *Op.Cit.*

⁹ World Bank Group, *Ringkasan Eksekutif: Mewujudkan Potensi Bisnis Indonesia* (Jakarta: Indonesia Economic Prospects, 2024), hlm.1.

3. Kebijakan fiskal (*fiscal stance*) membaik di tengah meningkatnya belanja sosial dan menurunnya keuntungan dari kenaikan harga komoditas.
 4. Bank Indonesia menerapkan kebijakan “suku bunga tinggi dengan kelonggaran makro prudensial” untuk menyeimbangkan upaya stabilitas mata uang dan ekonomi makro.
- B. Reformasi Birokrasi

Sebagai negara kesejahteraan, Indonesia dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik dapat dikatakan efektif apabila memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kemudahan yang sangat mungkin dilakukan pada era digital seperti saat ini tentu melalui media teknologi digital. Setiap lini kegiatan pemerintah dapat tersampaikan melalui media internet. Hal tersebut memudahkan masyarakat untuk mengetahui kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selain mendapatkan informasi, masyarakat memiliki kebutuhan untuk melakukan segala hal yang berkaitan dengan administrasi maupun perizinan berusaha dengan mudah melalui media digital, yaitu hanya dengan melalui ponsel pintar yang dimilikinya. Pelayanan publik yang baik yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat tersebut akan sulit terwujud tanpa disertai dengan upaya melakukan berbagai perubahan dalam segala bidang, terutama perubahan dalam area pelayanan publik dalam bentuk reformasi birokrasi.

Pelayanan publik menjadi area perubahan yang diharapkan pada upaya penerapan reformasi birokrasi Indonesia. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar

terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur, yang ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional serta bersih dari praktik KKN.¹⁰ Untuk mewujudkannya, capaian reformasi birokrasi dilakukan melalui beberapa gelombang, yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*. Gelombang pertama, yaitu *roadmap* Reformasi Birokrasi 2010-2014 memiliki tiga sasaran, diantaranya terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Gelombang pertama tersebut telah dilaksanakan pada periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya pada periode pemerintahan Presiden Jokowi memasuki *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025* gelombang kedua, yaitu *roadmap* sasaran berupa implementasi hasil-hasil yang sudah dicapai pada lima tahun pertama, juga melanjutkan upaya yang belum tercapai pada lima tahun pertama di berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah. Sementara, sasaran pada gelombang ketiga, yaitu *roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024 berupa peningkatan secara terus menerus kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada lima

¹⁰ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, *Profil Reformasi Birokrasi*, 2024, <https://www.kememparekraf.go.id/reformasi-birokrasi/profil>, diakses 4 Nov 2024 Pukul 19.14 wib.

tahun kedua untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Saat ini, pemerintah Indonesia telah memiliki komitmen untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya melalui penerapan *e-government* berupa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang termuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.¹¹

E-government berupa SPBE diwujudkan oleh Presiden Jokowi dengan meluncurkan *Super Apps* milik pemerintah yang bernama “INA Digital” pada 27 Mei 2024 yang dipimpin oleh Perum Peruri. *Super Apps* didefinisikan sebagai sebuah *platform mobile* atau aplikasi web yang menyediakan beberapa layanan dan dikemas dalam satu aplikasi.¹² Dalam peluncuran *Super Apps* tersebut, Jokowi mengatakan bahwa *Super Apps* tersebut sebagai jawaban atas permasalahan digitalisasi pelayanan publik yang selama ini tidak terintegrasi. Terdapat sekitar 27 ribu aplikasi yang dibuat seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah hingga saat ini namun belum terintegrasi satu sama lain. *Super Apps* tersebut akan mencakup pelayanan digital administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian. Beberapa di antaranya pengurusan SIM, STNK, paspor, hingga BPJS Kesehatan.¹³

¹¹ *Ibid.*,

¹² Fauziah Kurniati, *Peningkatan Pelayanan Publik Menuju Pemerintahan Kelas Dunia 2024*, Ombudsman Republik Indonesia, 2023, <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal-peningkatan-pelayanan-publik-menuju-pemerintahan-kelas-dunia-2024>, diakses 4 Nov 2024 pukul 18.59 wib.

¹³ Tim CNN Indonesia, *Jokowi Luncurkan Super Apps INA Digital: Setop Bikin Aplikasi Baru*, CNNIndonesia, 2024,

Selain reformasi birokrasi, perizinan berusaha juga merupakan langkah yang harus diakomodir oleh pemerintah untuk melahirkan dan mengembangkan berbagai usaha baru yang dirintis oleh masyarakat. Dengan adanya kemudahan mengajukan perizinan berusaha, akan semakin tercipta lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Untuk memenuhi keinginan masyarakat tersebut, pemerintah menyediakan platform digital dengan tujuan menyederhanakan proses perizinan berusaha. Salah satu wujud inovasi teknologi dan Informasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah dengan melahirkan terobosan canggih berupa “*Online Single Submission (OSS)*” melalui PP 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP OSS). Sebelumnya pemerintah membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk pengurusan izin-izin namun masih dirasa kurang sehingga pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian meresmikan OSS sebagai sistem yang mempermudah para pelaku bisnis dalam melakukan pengurusan perizinan usahanya. OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.¹⁴ Dengan perizinan berusaha yang diterbitkan melalui sistem elektronik terintegrasi, OSS menjadi tonggak kemajuan dan bisa membuka

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240527104812-185-1102295/jokowi-luncurkan-super-apps-ina-digital-setop-bikin-aplikasi-baru.>, diakses 4 Nov 2024 pukul 19.07 wib.

¹⁴ Legalitas. Org., *Sejarah OSS (Online Single Submission)*, 2023, <https://legalitas.org/tulisan/sejarah-oss-online-single-submission>, diakses 5 Nov 2024 Pukul 19.14 wib

gerbang kemudahan bagi para pelaku usaha (termasuk UMKM) baik dalam proses dan syarat untuk mendirikan perusahaan maupun untuk mendapatkan izin usaha.¹⁵ Singkatnya, sistem OSS memiliki dampak positif berupa pengajuan izin secara lebih efisien.¹⁶ Pada praktiknya, keberadaan OSS tersebut memiliki dampak besar bagi perekonomian Indonesia, seperti:¹⁷

1. Meningkatkan minat kewirausahaan.

Kemudahan dalam mengurus perizinan usaha akan membuat banyak orang lebih berminat untuk menjadi wirausaha. Masyarakat menjadi semakin kreatif dalam mencari peluang berusaha.

2. Memperluas lapangan kerja.

Karena banyak orang tertarik untuk menjadi wirausaha, maka jumlah pengangguran pun berkurang. Terlebih lagi, ketika usaha berkembang, para pemilik usaha akan membuka lapangan kerja sehingga dapat menekan angka pengangguran.

3. Mendorong investasi dalam negeri.

Kemudahan mendapatkan sertifikat standar usaha akan mendorong investasi dalam negeri. Investasi

¹⁵ Ewi Suyani dan Nafis Laelatullaena, "Efektivitas Penerapan Pelayanan Program Perizinan Berusaha Berbasis Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Tanjung Pinang", *REPEATER : Publikasi Teknik Informatika dan Jaringan* Vol. 2 No. 2 (2024): h.41-42, <https://doi.org/10.62951/repeater.v2i2>

¹⁶ Amara Dhea Puspitasari dan Dyah Suswanti Respatiningtias, "Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Perizinan Melalui Sistem OSS", *Journal of UKMC National Seminar on Accounting Proceeding* Vol. 2 No.1 (2023): h.15.

¹⁷ Legalyn, *4 Dampak Perizinan OSS untuk Bisnis di Indonesia: dari Peningkatan Investasi sampai Memperluas Lapangan Kerja, 2024*, <https://legalyn.id/4-dampak-perizinan-oss-bisnis-indonesia/>, diakses 4 Nov 2024 Pukul 19.22 wib.

asing ke dalam negeri pun bisa didorong melalui program ini karena perusahaan yang mendapatkan investasi dari luar negeri kini lebih mudah di dalam mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS.

4. Pemerintah lebih mudah memantau.

Dengan data yang lebih akurat, pemerintah dapat menyalurkan bantuan yang diperlukan agar usaha-usaha baru dapat berkembang. Selain itu, bisnis-bisnis kecil pun bisa terus meningkatkan standar produk dan layanannya dengan supervisi dari pemerintah.

C. Program-Program Kesejahteraan Sosial

Salah satu kriteria sebuah pemerintahan dikatakan berhasil adalah ketika terdapat peningkatan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kesejahteraan sosial merupakan sebuah kebutuhan di masing-masing negara, termasuk di dalam negara berkembang seperti Indonesia. Berbagai upaya untuk mewujudkannya sudah dilakukan oleh para Presiden sebelumnya. Upaya yang paling sering dilakukan adalah dengan pemberian Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat yang membutuhkan. Tujuan utama program Bansos, baik tunai maupun non tunai adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui pemenuhan kebutuhan dasar pada keluarga sangat miskin dan miskin. Bansos dapat diimplementasikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai bagian dari upaya menyejahterakan rakyat. Berdasarkan klasifikasi tujuannya, beberapa program Bansos yang dilakukan pada kepemimpinan Presiden Jokowi antara lain:

1. Bansos untuk mengurangi kemiskinan

- a. Bantuan Langsung Tunai (BLT)¹⁸

Pada mulanya, BLT disalurkan sebesar Rp200 ribu per bulan untuk tiga bulan pertama 2024 kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat untuk memitigasi risiko pangan. Presiden Jokowi menegaskan penyaluran BLT ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, karena kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.
- b. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan bantuan sosial yang disalurkan berdasarkan kriteria penerima yang telah ditetapkan. Melalui bantuan ini, pemerintah berharap bisa menekan angka kemiskinan dengan memberikan dukungan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, gizi, serta kebutuhan dasar lainnya. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan mencatatkan realisasi PKH sebesar Rp 19,74 triliun hingga 6 Oktober 2023. Adapun realisasi PKH ditujukan untuk 9,88 juta keluarga penerima manfaat.¹⁹
- c. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non-tunai kepada masyarakat kurang

¹⁸ Martha Herlinawati Simanjuntak, *Pemerintah berikan BLT Rp200 ribu/bulan kepada 18,8 juta keluarga*, Antaranews.com, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/3937482/pemerintah-berikan-blt-rp200-ribu-bulan-kepada-188-juta-keluarga> , diakses 5 Nov 2024 pukul 19.51 wib.

¹⁹ Zahwa Madjid, *Kemenkeu Lapor Realisasi Program Keluarga Harapan Rp 19 T per Oktober*, Katadata.co.id, 2023, <https://katadata.co.id/finansial/makro/65275e5ce6859/kemenkeu-lapor-realisasi-program-keluarga-harapan-rp-19-t-per-oktober>, diakses 5 Nov 2024 Pukul 20.18

mampu. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan, namun bantuan ini tidak dapat diuangkan. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa menggunakan bantuan tersebut untuk membeli bahan pangan di E-Warung (Elektronik Warung Gotong Royong). Selain itu, terdapat juga beberapa bantuan tambahan, seperti program bantuan beras sebanyak 10 kg untuk keluarga yang memenuhi syarat.²⁰

Melalui BLT, PKH, dan BPNT tersebut, angka kemiskinan ekstrem mampu diturunkan dari sebelumnya 6,1 persen menjadi 0,8 persen di tahun 2024. Angka stunting juga mampu dikurangi dari sebelumnya 37 persen menjadi 21,5 persen di tahun 2023. Tingkat pengangguran juga mampu ditekan dari sebelumnya 5,7 persen menjadi 4,8 persen di tahun 2024.²¹

2. Bansos untuk meningkatkan pendidikan

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan

²⁰ Digides, *Update Bansos Oktober 2024: PKH, BPNT, dan Bantuan Beras Siap Cair untuk Keluarga Penerima Manfaat*, Digitaldesa.id, 2024, <https://digitaldesa.id/artikel/update-bansos-oktober-2024-pkh-bpnt-dan-bantuan-beras-siap-cair-untuk-keluarga-penerima-manfaat>, diakses 4 Nov 2024 Pukul 19.57 wib.

²¹ Admin BNPP, *Presiden Jokowi Sampaikan Capaian Pembangunan 10 Tahun: Membangun Fondasi Indonesiasentris dari Pinggiran hingga Daerah Terluar*, Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), 2024, <https://bnpp.go.id/berita/jokowi-ungkap-capaian-pembangunan-10-tahun-membangun-fondasi-indonesiasentris-dari-pinggiran-hingga-daerah-terluar>, diakses 4 Nov 2024 Pukul 20.36 wib.

belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Adapun peserta didik yang mendapatkan PIP akan memiliki identitas dalam bentuk kartu yang disebut Kartu Indonesia Pintar (KIP). PIP merupakan program era Presiden Jokowi yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sejak 3 November 2014.²² PIP telah membawa dampak positif signifikan dalam meningkatkan keberlanjutan pendidikan di Indonesia. Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) menunjukkan bahwa peserta didik penerima PIP memiliki tingkat kelangsungan pendidikan lebih tinggi daripada peserta didik non penerima. Hasil survei pada tahun 2019, sekitar 97,29 persen peserta didik penerima PIP tetap bersekolah, hanya sekitar 2,71 persen yang putus sekolah. Perbandingannya jelas lebih baik daripada peserta didik non-penerima PIP, di mana sekitar 88,5 persen tetap bersekolah dan sekitar 11,5 persen putus sekolah. Hasil survei yang sama pada 2021 menunjukkan tren positif serupa. Angka putus sekolah tetap lebih tinggi pada peserta didik non-penerima PIP sebesar 11,28 persen. Dibandingkan dengan peserta didik penerima PIP sebesar 2,92 persen. Ini bukti kuat, PIP efektif dalam menurunkan

²² Redaksi Kabar Terkini, *Program Indonesia Pintar, Program Prioritas Era Presiden Jokowi Sejak 2014*, kabarterkini.co.id, 2024, <https://www.kabarterkini.co.id/program-indonesia-pintar-program-prioritas-era-presiden-jokowi-sejak-2014/> , diakses 4 Nov 2024 Pukul 20.09 wib.

angka putus sekolah di Indonesia.²³ Selanjutnya, menurut catatan Kemendikbudristek, alokasi PIP tahun 2024 ditujukan untuk 18,59 juta siswa SD, SMP, dan SMA/SMK. Jumlah bantuan dana PIP untuk siswa jenjang SMA/SMK meningkat dari Rp1 juta pada 2023 menjadi Rp1,8 juta tahun 2024.²⁴

D. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi dan otonomi adalah dua hal yang sangat berkaitan dan berperan besar dalam meningkatkan pembangunan di setiap daerah sehingga kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan. Desa adalah satuan daerah terkecil di Indonesia yang membutuhkan perhatian besar dari pemerintah. Apabila masing-masing desa dibangun sedemikian maju, maka kesejahteraan masyarakat Indonesia akan semakin merata. Pembangunan desa tidak akan terwujud jika tidak ada dana desa yang disalurkan ke masing-masing desa.

Presiden Jokowi menegaskan bentuk nyata komitmen pemerintah untuk melakukan pembangunan secara merata hingga ke desa. Presiden menyebut hal tersebut dapat dilihat dari dana desa yang telah tersalurkan untuk membangun desa-desa di seluruh Tanah Air. Sampai saat ini sudah Rp.539 triliun dana desa

²³ Adminpplp, *Fakta...PIP Mampu Turunkan Angka Putus Sekolah*, Kemdikbud.go.id, 2022, <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/fakta-pip-mampu-turunkan-angka-putus-sekolah/> diakses 5 Nov 2024 Pukul 20.13 wib.

²⁴ Dewi Restu Mangeswuri, "Efektivitas Program Bantuan Sosial Dalam Pengendalian Inflasi" , *Jurnal Info Singkat: KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS* Vol. XVI No. 3/I/Pusaka/Februari/2024 (2024): h. 13.

yang disalurkan ke desa-desa.²⁵ Dalam 10 tahun roda kepemimpinannya, dana desa yang disalurkan ke desa-desa tersebut telah digunakan untuk membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, 43 bendungan baru, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru. Berbagai pembangunan desa tersebut terbukti pemerintah berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24 persen menjadi 14 persen di tahun 2023. Sehingga, bisa meningkatkan daya saing dunia dari sebelumnya Indonesia berada di peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Hal ini memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan.²⁶ Selain itu, selama pemerintahan Jokowi, empat provinsi baru muncul, membawa Indonesia dari 34 menjadi 38 provinsi. Langkah ini dianggap sebagai bentuk nyata desentralisasi dan otonomi daerah, yang bertujuan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.²⁷

E. Kebijakan Lingkungan Hidup

²⁵ BPMI Setpres, *Presiden Jokowi Tegaskan Komitmen Pemerintah dalam Pemerataan Pembangunan Melalui Dana Desa*, Menpan.go.id, 2024, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/presiden-jokowi-tegaskan-komitmen-pemerintah-dalam-pemerataan-pembangunan-melalui-dana-desa>, diakses 4 Nov 2024 Pukul 20.23 wib.

²⁶ Admin BNPP, *Op.Cit.*

²⁷ Emanuella Bungasmara Ega Tirta, *Di Tangan Jokowi RI Punya 4 Provinsi Baru, Bagaimana di Era Prabowo?*, CNBC Indonesia, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20241019172141-128-581058/di-tangan-jokowi-ri-punya-4-provinsi-baru-bagaimana-di-era-prabowo>, diakses 4 Nov 2024 Pukul 20.26 wib.

Pelestarian lingkungan merupakan upaya nyata dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan demi menjaga kehidupan ekosistem yang ada dalam sebuah negara. Indonesia adalah negara yang beriklim tropis yang tidak dapat terlepas dari berbagai tantangan kelola lingkungan, terutama terkait deforestasi dan polusi. Pemerintahan Presiden Jokowi mempunyai komitmen dalam menghadapi tantangan tersebut, antara lain:²⁸

1. Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2023 berhasil ditekan lebih kecil dibandingkan tahun 2019. Indonesia berhasil memitigasi dampak El Nino sehingga jumlah hotspot dan luas karhutla tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Luas karhutla pada tahun 2023 adalah 1.161.192 ha sedangkan luas karhutla pada tahun 2019 adalah 1.649.258 ha. Penurunan luas karhutla jika dibandingkan tahun 2019 seluas 488.065 ha atau 29,59 persen.
2. Program Komunitas untuk Iklim
Kontribusi nyata aksi iklim oleh masyarakat telah didorong dan difasilitasi melalui Program Kampung Iklim (ProKlim) sejak tahun 2012 dan menjadi gerakan nasional pada tahun 2015. Hingga tahun 2023 ProKlim telah dilaksanakan pada 7.264 lokasi ProKlim.
3. Kontribusi dalam Konteks Regional (ASEAN)
Kepemimpinan Indonesia dalam Pengendalian Perubahan Iklim juga ditunjukkan melalui kerja sama

²⁸ PPID, *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kemajuan Aksi Perubahan Iklim Indonesia: Leading by Examples*, Menlhk.go.id, 2024, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7584/kemajuan-aksi-perubahan-iklim-indonesia-leading-by-examples> , diakses 4 Nov 2024 Pukul 20.36 wib.

regional. Pada tahun 2023, Indonesia telah menginisiasi tiga proyek terkait pengendalian perubahan iklim, yakni: (1) *ASEAN Joint Statement on Climate Change to the COP 28 UNFCCC (AJSCC)*; (2) *ASEAN Community-based Climate Action*; dan (3) *ASEAN Co-ordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC)*.

4. Penguatan Aksi Perubahan Iklim

Dalam upaya mendorong upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, Indonesia telah memikirkan pemberian insentif kepada para pelaku aksi mitigasi, yaitu melalui kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) melalui Perdagangan Karbon. Indonesia juga telah mengimplementasikan *Enhance Transparency Framework* sebagai mandat artikel 13 *Paris Agreement*, antara lain membangun Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) untuk merekognisi aksi-aksi yang telah dilakukan oleh *stakeholders* yang telah mengikuti metodologi dan aturan-aturan yang telah disepakati Internasional. Melalui proses di SRN dapat diterbitkan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca yang dapat diperjualbelikan sebagai bagian dari insentif kepada para pelaku aksi mitigasi.

5. Deforestasi²⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.30/Menhut II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD), deforestasi

²⁹ PPID, *Pengendalian Deforestasi dan Karhutla di Indonesia*, Menlhk.go.id, 2024, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7594/pengendalian-deforestasi-dan-karhutla-di-indonesia>, diakses 4 Nov 2024 Pukul 21.08 wib.

adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Deforestasi tertinggi terjadi pada periode tahun 1996 sampai 2000, sebesar 3,5 juta ha per tahun, periode 2002 sampai 2014 sebesar 0,75 juta ha per tahun, dan mencapai titik terendah laju deforestasi pada tahun 2022 sebesar 104 ribu ha, yaitu pada era Jokowi. Menurut data *World Resources Institute Global*, deforestasi terendah dicapai di era Jokowi. Selain itu, RI sebagai negara nomor satu tingkat penurunan deforestasinya di dunia sebesar 65 persen, yang dicapai di era pemerintahan Jokowi. Kebakaran hutan dan lahan tahun 2023 berhasil ditekan lebih kecil sebesar 30,80 persen dibandingkan tahun 2019 dengan pengaruh El-Nino yang hampir sama, bahkan kondisi 2023 lebih kering. Kondisi ini telah diantisipasi melalui berbagai upaya pencegahan karhutla sejak awal tahun. Kondisi ini menjadi indikasi adanya keberhasilan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang efektif. Data Pemerintah mencatat bahwa luas kebakaran hutan dan lahan dari tahun 2015 menunjukkan tren menurun sampai Oktober 2023 secara signifikan di angka 94-37 persen.

F. Perlindungan HAM.

Perlindungan HAM merupakan tugas negara tanpa henti untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakatnya. UUDNRI Tahun 1945 memberikan berbagai perlindungan HAM dalam berbagai pasal, sebut saja dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 31. Lebih dari itu, Indonesia mempunyai UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan kedua perlindungan tersebut, Indonesia mempunyai keseriusan

dalam berkomitmen melindungi HAM, hal ini terbukti di setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh ada satu pasal pun yang melanggar HAM. Namun demikian tidak mudah melakukan perlindungan HAM di negara dengan jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa ini, dengan keberagaman luar biasa, dan tentu dengan berbagai permasalahan yang sangat beragam. Pemerintahan Presiden Jokowi berupaya untuk mewujudkan perlindungan HAM tersebut dalam berbagai lini kehidupan masyarakat dalam berbagai kebijakannya, meskipun masih terdapat catatan pelanggaran HAM yang terjadi, antara lain:³⁰

1. KUHP baru

Pada 2 Januari 2023, Presiden Jokowi mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang berisi sejumlah ketentuan bermasalah yang apabila diterapkan dan ditegakkan, akan melemahkan kebebasan berbicara, berkeyakinan, dan berserikat serta membahayakan hak-hak perempuan, minoritas agama, dan LGBT. KUHP ini mulai berlaku pada Januari 2026. KUHP baru tersebut mengkriminalisasi seks atas dasar suka sama suka di luar pernikahan dan kumpul kebo, yang memungkinkan hadirnya gangguan ke dalam keputusan paling intim terhadap individu dan keluarga. Karena pasangan sesama jenis tidak dapat menikah di Indonesia, ketentuan tersebut secara efektif membuat perilaku seksual sesama jenis ilegal. Selain itu, pasal mengenai penodaan agama

³⁰ Tirana Hassan, *Human Rights Watch, World Report 2024: Indonesia Berbagai Peristiwa Tahun 2023*, Hrw.org, 2024, <https://www.hrw.org/id/world-report/2024/country-chapters/indonesia>, diakses 4 Nov 2024 Pukul 22.26 wib.

diperluas hingga mencakup pasal yang mengkriminalisasi kemurtadan. KUHP tersebut juga mengkriminalisasi ujaran yang menghina atau merendahkan pejabat tinggi pemerintahan maupun lembaga negara dan memperluas pasal mengenai pidana pencemaran dan “berita palsu.”

2. Hak Perempuan dan Anak Perempuan

Banyak provinsi, kabupaten, dan kota masih memberlakukan aturan berpakaian yang diskriminatif terhadap perempuan dan anak perempuan. *Human Rights Watch* mendokumentasikan intimidasi yang meluas terhadap anak perempuan dan perempuan untuk mengenakan jilbab, dan tekanan psikologis mendalam yang ditimbulkannya pada anak perempuan dan perempuan, serta keluarga mereka. Sejumlah anak perempuan yang tidak patuh telah dikeluarkan dari sekolah, termasuk di sekolah negeri, atau dipaksa mundur di bawah tekanan. Banyak siswa dan guru non muslim dipaksa untuk memakai jilbab. *Human Rights Watch* telah mendokumentasikan dampak negatif yang ditimbulkan oleh sedikitnya 64 peraturan wajib jilbab di Indonesia.

3. Kebebasan Beragama

Seperti dalam dua dekade sebelumnya, pemerintah tidak berbuat banyak untuk menghentikan kelompok-kelompok Islam menyerang atau melecehkan kalangan minoritas agama atau meminta pertanggungjawaban para pelaku. Misalnya, pada tanggal 17 September 2023, puluhan militan Muslim menghentikan kegiatan ibadah Gereja Bethel Indonesia Cinere Bellevue Depok, dengan alasan "tidak memiliki izin" untuk berkegiatan.

Pada bulan Maret, polisi menangkap seorang bintang TikTok, Lina Mukherjee, dengan hukum penodaan agama karena mengunggah sebuah video saat ia sedang makan daging babi setelah berdoa secara Islam. Pada bulan September, Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan penjara kepadanya.

4. Perlindungan data pribadi³¹

UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang disahkan pada Oktober 2022 nyatanya belum cukup menekan jumlah kasus pelanggaran hak atas privasi secara signifikan. Catatan ELSAM menemukan setidaknya 406 juta data mengalami kebocoran pasca UU PDP disahkan. Ketiadaan lembaga pengawas perlindungan data pribadi independen berimplikasi pada ketidakpastian penyelesaian kasus kebocoran data. Dari banyaknya kasus kebocoran data yang terjadi, tidak ada satu pun kasus yang diusut tuntas, bahkan korban tidak dapat mengetahui sejauh mana penyelesaiannya serta tidak ada mekanisme yang pasti bagi korban untuk menuntut kerugian yang dialami akibat kebocoran data.

5. Lain-lain

Dalam berbagai kasus, masih ditemui pihak berwenang Indonesia melakukan atau membiarkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan diskriminasi atas dasar agama, etnis,

³¹ Setara, *Ringkasan Eksekutif Indeks Hak Asasi Manusia 2023 Stagnasi Ham Menjelang Satu Dekade Jokowi*, (Jakarta: Internasional NGO Forum on Indonesian Development, 2024), h.9.

sosial, gender, dan orientasi seksual. Militer dan polisi masih melakukan pelanggaran tanpa tersentuh hukum, terutama di Papua Barat, di mana pihak berwenang terus membatasi perjalanan dan akses media, diplomat, dan pemantau HAM asing. Masih ditemui pula tanggapan terhadap protes masyarakat masih dianggap kurang memenuhi rasa kepuasan masyarakat Indonesia. Terlebih lagi, masih terjadi beberapa kasus salah tangkap yang sengaja dilakukan oleh pihak kepolisian, yang dilakukan hanya semata-mata untuk meredam sebuah kasus yang sedang viral di masyarakat.

IV. Kesimpulan

Pemerintahan dua periode Presiden Jokowi dapat dikatakan efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, Pemerintahan Presiden Jokowi sangat berfokus pada pembangunan infrastruktur sebagai sarana untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Proyek-proyek besar, termasuk jalan, bandara, dan pelabuhan, telah dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan mengurangi biaya logistik. Kedua, berbagai upaya telah dilakukan untuk mereformasi proses birokrasi di Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi korupsi di berbagai sektor. Inisiatif-inisiatif seperti sistem *Online Single Submission (OSS)* bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan bisnis dan investasi. Ketiga, Pemerintahan Jokowi juga telah mengimplementasikan berbagai program kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendidikan. Keempat, Presiden Jokowi telah mendukung upaya desentralisasi untuk memberdayakan pemerintah daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan layanan publik dan pembangunan daerah. Kelima, meskipun dalam masa pemerintahan

Presiden Jokowi telah menghadapi berbagai tantangan terkait tata kelola lingkungan, terutama terkait deforestasi dan polusi, namun berbagai kebijakan Jokowi dalam lingkup lingkungan hidup telah dapat mengahadapinya.

Terlepas dari efektivitas pemerintahan yang dicapai, masa kepresidenan Jokowi dapat dikatakan belum optimal. Hal ini terbukti dari masih banyaknya tantangan lingkungan ke depan sebagai sebuah negara beriklim tropis, serta adanya berbagai pelanggaran HAM yang belum tuntas. Terlebih, sikap Presiden Jokowi dalam menghadapi kritik atas berbagai masalah seperti masalah HAM, tanggapan terhadap protes masyarakat masih dianggap kurang memenuhi rasa kepuasan masyarakat Indonesia, serta masih terjadi beberapa kasus *no viral no justice*.

V. Daftar Pustaka

- Mangeswuri, Dewi Restu “Efektivitas Program Bantuan Sosial Dalam Pengendalian Inflasi” , *Jurnal Info Singkat: KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS* Vol. XVI No. 3/I/Pusaka/Februari/2024 (2024): 13.
- Puspitasari, Amara Dhea dan Dyah Suswanti Respatiningtias, “Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Perizinan Melalui Sistem OSS”, *Journal of UKMC National Seminar on Accounting Proceeding* Vol. 2 No.1 (2023): 15.
- Suyani, Ewi dan Nafis Laelatullaena, “Efektivitas Penerapan Pelayanan Program Perizinan Berusaha Berbasis Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjung Pinang”, *REPEATER : Publikasi Teknik Informatika dan Jaringan* Vol. 2 No. 2 (2024): 41-42, <https://doi.org/10.62951/repeater.v2i2>

Buku

Arsyad, *Lincoln Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi*, Ekonomi Pembangunan Edisi 5 (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009).

Setara, *Ringkasan Eksekutif Indeks Hak Asasi Manusi 2023: Stagnasi HAM Menjelang Satu Dekade Jokowi*, (Jakarta: Internasional NGO Forum on Indonesian Development, 2024).

World Bank Group, *Ringkasan Eksekutif: Mewujudkan Potensi Bisnis Indonesia* (Jakarta: Indonesia Economic Prospects, 2024).

Internet

Admin BNPP, *Presiden Jokowi Sampaikan Capaian Pembangunan 10 Tahun: Membangun Fondasi Indonesiasentris dari Pinggiran hingga Daerah Terluar*, Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), 2024, <https://bnpp.go.id/berita/jokowi-ungkap-capaian-pembangunan-10-tahun-membangun-fondasi-indonesiasentris-dari-pinggiran-hingga-daerah-terluar>.

Adminpplp, *Fakta...PIP Mampu Turunkan Angka Putus Sekolah*, [Kemdikbud.go.id](https://puslapdik.kemdikbud.go.id/fakta-pip-mampu-turunkan-angka-putus-sekolah/), 2022, <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/fakta-pip-mampu-turunkan-angka-putus-sekolah/>.

BPMI Setpres, *Presiden Jokowi Tegaskan Komitmen Pemerintah dalam Pemerataan Pembangunan Melalui Dana Desa*, [Menpan.go.id](https://www.menpan.go.id), 2024, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/presiden-jokowi-tegaskan-komitmen-pemerintah-dalam-pemerataan-pembangunan-melalui-dana-desa>.

-
- Digides, *Update Bansos Oktober 2024: PKH, BPNT, dan Bantuan Beras Siap Cair untuk Keluarga Penerima Manfaat*, Digitaldesa.id, 2024, <https://digitaldesa.id/artikel/update-bansos-oktober-2024-pkh-bpnt-dan-bantuan-beras-siap-cair-untuk-keluarga-penerima-manfaat> .
- Hassan, Tirana, *Human Rights Watch, World Report 2024: Indonesia Berbagai Peristiwa Tahun 2023*, Hrw.org, 2024, <https://www.hrw.org/id/world-report/2024/country-chapters/indonesia> .
- Informasi Statistik Infrastruktur Kementerian PUPR 2023, <https://data.pu.go.id/sites/default/files/BIS%20PU%20Tahun%202023.pdf>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, *Profil Reformasi Birokrasi*, 2024, <https://www.kemenparekraf.go.id/reformasi-birokrasi/profil>.
- Kurniati, Fauziah, *Peningkatan Pelayanan Publik Menuju Pemerintahan Kelas Dunia 2024*, Ombudsman Republik Indonesia, 2023, <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk-internal--peningkatan-pelayanan-publik-menuju-pemerintahan-kelas-dunia-2024>.
- Legalitas. Org., *Sejarah OSS (Online Single Submission)*, 2023, <https://legalitas.org/tulisan/sejarah-oss-online-single-submission>.
- Legalyn, *4 Dampak Perizinan OSS untuk Bisnis di Indonesia: dari Peningkatan Investasi sampai Memperluas Lapangan Kerja*, 2024, <https://legalyn.id/4-dampak-perizinan-oss-bisnis-indonesia/>.
- Madjid, *Zahwa Kemenkeu Laporan Realisasi Program Keluarga Harapan Rp 19 T per Oktober*, Katadata.co.id,

- 2023, <https://katadata.co.id/finansial/makro/65275e5ce6859/kemenkeu-lapor-realisasi-program-keluarga-harapan-rp-19-t-per-oktober>.
- PPID, *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kemajuan Aksi Perubahan Iklim Indonesia: Leading by Examples*, Menlhk.go.id, 2024, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7584/kemajuan-aksi-perubahan-iklim-indonesia-leading-by-examples>.
- PPID, *Pengendalian Deforestasi dan Karhutla di Indonesia*, Menlhk.go.id, 2024, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7594/pengendalian-deforestasi-dan-karhutla-di-indonesia>.
- Redaksi Kabar Terkini, *Program Indonesia Pintar, Program Prioritas Era Presiden Jokowi Sejak 2014*, kabarterkini.co.id, 2024, <https://www.kabarterkini.co.id/program-indonesia-pintar-program-prioritas-era-presiden-jokowi-sejak-2014/>.
- Rohim, Hafi Amarta Afroni *Pembangunan Infrastruktur Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2024, https://www.setneg.go.id/baca/index/pembangunan_infrastruktur_dorong_pertumbuhan_ekonomi_indonesia.
- Simanjuntak, Martha Herlinawati, *Pemerintah berikan BLT Rp200 ribu/bulan kepada 18,8 juta keluarga*, Antaranews.com, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/3937482/pemerintah-berikan-blt-rp200-ribu-bulan-kepada-188-juta-keluarga>.

Sugiarto, Eddy Cahyono *Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Indonesia Maju*, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2024, https://www.setneg.go.id/baca/index/melanjutkan_pembangunan_infrastruktur_dan_indonesia_maju#:~:text=Pembangunan%20infrastruktur%20merupakan%20modal%20atau,taraf%20hidup%20masyarakat%20secara%20luas.

Sutrisno, Eri, *10 Tahun Pembangunan Infrastruktur: Menghubungkan Nusantara, Menggerakkan Ekonomi*, Indonesia.go.id, 2024, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8648/10-tahun-pembangunan-infrastruktur-menghubungkan-nusantara-menggerakkan-ekonomi?lang=1>.

Tim CNN Indonesia, *Jokowi Luncurkan Super Apps INA Digital: Setop Bikin Aplikasi Baru*, CNNIndonesia, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240527104812-185-1102295/jokowi-luncurkan-super-apps-ina-digital-setop-bikin-aplikasi-baru>.

Tirta, Emanuella Bungasmara Ega, *Di Tangan Jokowi RI Punya 4 Provinsi Baru, Bagaimana di Era Prabowo?*, CNBC Indonesia, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20241019172141-128-581058/di-tangan-jokowi-ri-punya-4-provinsi-baru-bagaimana-di-era-prabowo>.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights